

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KELAS IA

AGUSTUS

TAHUN 2022


LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
Berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Banda Aceh
Pada hari Rabu, 31 Agustus 2022,

Management Representatif,

Koordinator Tim Survei


EDY SUBAGIYO, S.H., M.H

NIP. 1974061251993031001



ELVIYANTI PUTRI SH.MH

NIP. 19740905 199903 2 006

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA


R.HENDRAL, S.H., M.H.

NIP. 197008161996031003

KATA PENGANTAR


Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengadilan negeri banda aceh kelas 1A mengadakan kegiatan survei hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan survei persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Survei ini menanyakan pendapat kepada masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A melalui pengisian kuisisioner yang telah disediakan.

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Bulan Agustus tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan publik khususnya dalam pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri banda Aceh.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas survei dan laporan survei. Semoga survei ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya semua aparaturnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.

Banda Aceh 31 Agustus 2022
Plh.Panitera Muda Hukum



Rahmi Yanti,SH,MH

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
DEMOGRAFI RESPONDEN	9
3.1. Hasil Quesioner	9
BAB IV HASIL SURVEI	10
BAB V PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	11
4.2. Rekomendasi.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Bulan Agustus tahun 2022 pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
- f) Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

1.4. Rencana Kerja Dan Pelaksanaan

Survei atau pengukuran indeks persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	28 Agustus 2022
2.	Pengumpulan Data /Survei IKM	29 Agustus 2022
3.	Pengolahan dan Penyusunan Laporan	31 Agustus 2022

1.4.1. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

1.4.2. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu bulan Agustus

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan pengisian kuesioner yang terdapat pada Lobi Pengadilan dengan menggunakan Aplikasi Si Super kepada masyarakat pengguna layanan. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan menggunakan layanan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data Laporan Bulanan dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data maximal sekitar 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
Hasil Quesiner

Lampiran 1. Hasil Analisa Data Survei Indeks Persepsi Korupsi

NO. URUT RESPONDEN	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN									
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NRR PER UNSUR	107	108	105	106	107	108	106	108	108	108
NILAI PER UNSUR	3.96	4.00	3.89	3.93	3.96	4.00	3.93	4.00	4.00	4.00
NRR TERTIMBANG	0.40	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
NILAI IPK										3,97

BAB IV
HASIL SURVEI

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 18 angket. Berdasarkan survey indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebesar 4,00 % berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 88,31– 100,00).

Hasil tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap keseluruhan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

No.	Ruang Lingkup	Skor Rata-Rata	Kategori
1.	Indikator Manipulasi Peraturan	3.96	Bersih Dari Korupsi
2.	Indikator Penyalahgunaan Jabatan	4.00	Bersih Dari Korupsi
3.	Indikator Menjual Pengaruh	3.89	Bersih Dari Korupsi
4.	Indikator Transparansi Biaya	3.93	Bersih Dari Korupsi
5.	Indikator Transaksi Rahasia	3.96	Bersih Dari Korupsi
6.	Indikator Biaya Tambahan	4,00	Bersih Dari Korupsi
7.	Indikator Hadiah	3.93	Bersih Dari Korupsi
8.	Indikator Transparansi Pembayaran	4,00	Bersih Dari Korupsi
9.	Indikator Percaloan	4,00	Bersih Dari Korupsi
10.	Indikator Perbuatan Curang	4,00	Bersih Dari Korupsi

Dari hasil Survey Indek Persepsi Anti Korupsi Tersebut di atas, terdapat 3 nilai Terendah Per unsur Terdiri dari

1. Indikator Menjual Pengaruh : Nilai **3.89**
2. Indikator Indikator Transparansi Biaya : Nilai **3.93**
3. Indikator Biaya Tambahan : Nilai **3.93**

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banda Aceh diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,97** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **(3,96)**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **(4,00)**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **(3,89)**
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **(3,93)**
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **(3,96)**
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **(4,00)**
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks **(3,93)**
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **(4,00)**
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks **(4,00)**
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **(4,00)**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bulan Agustus Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **88,30 -100%** atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.

4.3. SUSUNAN TIM SURVEI

Ketua : **ELVIYANTI PUTRI,SH.MH**

Sekretaris : **RAHMI YANTI, SH.MH**

Anggota : **SYUKRAN A.Md**

: **Nuzul Asni, A.Md**



ANALISIS DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA

PERIODE AGUSTUS 2022

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN										Keterangan
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	U 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Nilai Per Unsur	107	108	105	106	107	108	106	108	108	108	
NRR Per Unsur	3.96	4.00	3.89	3.93	3.96	4.00	3.93	4.00	4.00	4.00	39.67
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	3.97
KATEGORI											SANGAT BAIK

Keterangan :

NRR = Nilai Rata-rata

IPK = Indeks Persepsi Masyarakat

NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur dibagi dengan Jumlah Kuesioner yang Terisi

NRR Tertimbang = NRR Per Unsur x 0,1

IPK = NRR Tertimbang x 25

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	: 3,5324 - 4,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	: 3,0644 - 3,532
C (Cukup Baik)	: 65,00 - 76,60	: 2,60 - 3,064
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99	: 1,00 - 2,5996

Plh. Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh


 RAHMI YANTI, SH.MH



**INDEK PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2022**

NAMA PELAYANAN : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah Responden : 27 Orang

Laki Laki : 19 Orang

Perempuan : 8 Orang

**NILAI IPK
AGUSTUS 2022
KATEGORI
BEBAS DARI KORUPSI**

3,97

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH DIBERIKAN
MASUKAN BAPAK/IBU/SAUDARA/I/ SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**Ketua/Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA**

**R.HENDRAL,S.H.M.H
NIP. 19700816 199603 1 003**